

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONOR GURU TIDAK TETAP PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ROTONDY RUSDAN ALAMSYAH

2010113094

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



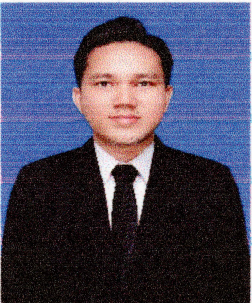
Dosen Pembimbing:

Dr. Khairani, S.H., M.H.

Hendria Fithrina, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

	No. Alumni Universitas	Rotondy Rusdan Alamsyah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang / 30 Oktober 2002 b. Nama Orangtua : Rohabdi Rusdan, S.Pd c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2010113094	f. Tanggal Lulus : 20 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3.72 j. Alamat : Komplek Polamas 1, JL. Ketilang No. 7A, Andalas, Padang Timur, Kota Padang	

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONOR GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PADANG**

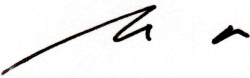
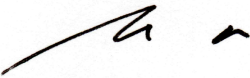
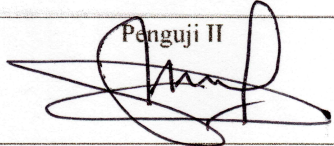
(Rotondy Rusdan Alamsyah 2010113094, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 halaman + x halaman, 2024)

ABSTRAK


Menurut survei yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2023, banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Beberapa bahkan hanya menerima Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, pada tahun 2021, dilaporkan bahwa banyak guru honorer menerima gaji antara Rp 300.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan, jauh di bawah UMR provinsi yang saat itu sekitar Rp 2.484.041. Guru honor berdasarkan hukum konstitusi memiliki hak yang sama dengan status guru di Indonesia meliputi hak akses yang sama, kesehatan, perlindungan, dan penghidupan yang layak. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan keadaan yang berbeda. Sebagaimana hasil penelitian sementara di Kota Padang masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagaimana yang dijanjikan konstitusi, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2), serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1). Hal ini menjadi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk membahas pengawasan honorarium guru honor pada SMPN di Kota Padang yang dirumuskan kedalam 2 (dua) permasalahan yaitu 1) bagaimana penetapan honorarium guru honor di Kota Padang, dan 2) bagaimana pelaksanaan pembayaran honorarium tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang melihat permasalahan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan dari sudut pandang teori hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan dan pembayaran honorarium guru honor di SMPN di Kota Padang berdasarkan kebijakan kepala sekolah dan pemerintah Kota Padang dimana penetapan honorarium yang ada masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, inkonsistensi dalam implementasi regulasi, dan kurangnya transparansi dalam proses pembayaran. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan penyederhanaan prosedur administratif.

Kata Kunci: Honorarium, Guru Honorer, Pelaksanaan, Pengawasan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2024. Penguji,


Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Rotondy Rusdan Alamsyah	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Gusminarti, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Rotondy Rusdan Alamsyah	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang / 30 October 2002 b. Parents Name : Rohabdi Rusdan, S. Pd c. Faculty : Law d. Concentratio : Administration Law e. No. BP : 2010113094		f. Graduation Date : 20 August 2024 g. Predicate : With Honours h. Length of Study : 4 Years 0 Months i. GPA : 3.72 j. Address : Komplek Polamas 1, JL. Ketilang No. 7A, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang

IMPLEMENTATION OF NON-PERMANENT TEACHER HONORARIUM PAYMENTS AT PUBLIC JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN PADANG CITY

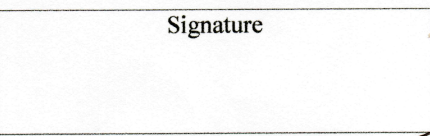
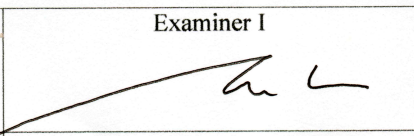
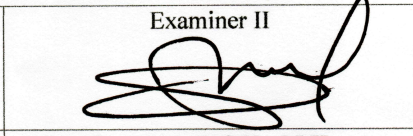
(Rotondy Rusdan Alamsyah, 2010113094, Concentration Program Administration Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 95 pages + x pages, 2024)

ABSTRACT

A survey conducted by the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI) in 2023 revealed that a considerable number of honorary teachers receive salaries that fall below the regional minimum wage (UMR). Some receive as little as IDR 300,000 to IDR 500,000 per month. In West Sumatra, including Padang City, in 2021, it was reported that many honorary teachers received salaries of between IDR 300,000 and IDR 1,500,000 per month, which is considerably below the provincial minimum wage, which at the time was approximately IDR 2,484,041. In accordance with the stipulations set forth in the Constitution, honorarium teachers are entitled to the same rights as their counterparts in the Indonesian education system, including the right to equal access, health protection, and a decent livelihood. However, the evidence suggests otherwise. The results of preliminary research conducted in Padang City indicate that numerous honorary teachers continue to be denied the full rights enshrined in the Constitution, particularly the rights to work and a decent livelihood (Article 27, paragraph 2) and to work and receive fair compensation (Article 28D, paragraph 2). Furthermore, they are entitled to fair and decent compensation and treatment in employment relations (Article 28D, paragraph 2), as well as the right to live in a healthy and prosperous environment and to receive health services (Article 28H, paragraph 1). This issue has prompted researchers to consider the supervision of honorarium teachers at SMPN in Padang City. This has led to the formulation of two key problems: firstly, how the determination of honorarium teachers in Padang City is made and secondly, how honorarium payments are implemented. In analysing these problems, a juridical-empirical method is employed, utilising a statutory and conceptual approach that considers the problem from the perspective of legislation and legal theory. The findings of this study indicate that the implementation and payment system for honorarium teachers in SMPN in Padang City is based on the policies of the school principal and the Padang City government. However, the determination of honorarium continues to encounter various challenges, including limited human resources, inconsistencies in the implementation of regulations, and a lack of transparency in the payment process. Furthermore, the research revealed a discrepancy between policy and practice. In light of these findings, it is recommended that the supervisory system be strengthened through the utilisation of information technology, an increase in the capacity of supervisors, and the simplification of administrative procedures.

Keywords: Honorarium, Honorary Teachers, Implementation of Supervision.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August, 20th 2024 Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Rotondy Rusdan Alamsyah	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Gusminarti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of Administration Law: **Hendri Fithrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature :
No. Alumni University:	Name:	Signature :